

BAB I

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH - Tahun 2019

Satuan Organisasi Tata Kerja Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 68 tahun 2016, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana Tugas pokok dan Fungsi Biro Humas di uraikan dalam Pasal 31 sampai dengan pasal 40.

Disebutkan dalam pasal 31 ayat (1)

Biro Humas mempunyai tugas pokok membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pemantauan dan evaluasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan hubungan masyarakat.

Selanjutnya sesuai tugas pokok dan fungsi, Biro Humas merumuskan kebijakan guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas pemberitaan sebagai upaya mendorong peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Menganalisa, mengevaluasi dan memonitoring dalam peran dan fungsi mengawasi stabilitas pemberitaan penyelenggaraan informasi pembangunan daerah.
3. Mendorong peningkatan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Humas Kabupaten/Kota dalam peliputan kegiatan dan penghimpunan materi pemberitaan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menjalin kerjasama profesional dengan mitra pers/media massa.

A. Capaian Pelaksanaan Program

Untuk mendukung fungsi Sekretariat Daerah melalui Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Humas Tahun 2019 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera

Barat sebesar Rp. 3.763.437.920,- dan realisasi Rp.3.599.409.653,- (95,64%), dengan laporan sebagai berikut :

Biro Humas Sekretariat Daerah merupakan bahagian dari urusan Pemerintahan pada pada Tahun anggaran 2019 melaksanakan tugas dan fungsinya melalui 6 Program, yang terdiri dari 5 Program pokok dan 1 Program urusan sebagai berikut:

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,**
Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 946.145.220,00 telah terealisasi sebesar Rp. 925.995.571,00 atau persentase sebesar (97,87%).
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,**
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 2 (dua) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 95.051.900,00 atau persentase sebesar (95,05 %).
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,**
dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 145.330.050,- terealisasi sebesar Rp. 44.795.650,00 atau persentase sebesar (30,82%).
- 4) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,**
terdapat 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 111.960.800,00 terealisasi sebesar Rp. 107.331.600,00 sisa anggaran sebesar Rp. 4.629.200,00. persentase realisasi keuangan sebesar (95,87 %).

1 (satu) program urusan yang dilaksanakan terkait dengan peran, tugas pokok dan fungsi Biro Humas dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu:

- 5) **Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**
Didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 2.599.681.500,00 terealisasi sebesar Rp. 2.465.779.772,00 atau persentase sebesar (94,85 %).

Capaian Program yaitu :

- a. Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi di Media Massa.
- b. Ratio pemberitaan (yang berimbang),

- c. Jumlah Publikasi kegiatan Pemprov Sumbar di Media Cetak, dan Elektronik
- d. Persentase liputan kegiatan Pemerintah Daerah

Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) buah kegiatan yaitu:

5.1. Penyebaran informasi Pembangunan Melalui media Luar/Ruang.

Tersedia anggaran setelah perubahan sebesar Rp 203.518.120,00 direalisasikan sebesar Rp. 187.843.540,00 dengan persentase 92,30%.
output kegiatan : Penyampaian pesan pesan pembangunan pemerintah daerah melalui media luar ruang (spanduk, baliho).

5.2. Peningkatan Sumberdaya Kehumasan

Untuk Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kehumasan berupa pendukung kegiatan Bimtek Kehumasan untuk lingkup SKPD Pemerintah propinsi yang dianggarkan sebesar Rp. 170.688.500,00 realisasinya sebesar Rp. 162.311.199,00 dengan persentase 95,09%,
output kegiatan:Terlaksananya 1 kali Workshop Pengembangan keterampilan kehumasan

5.3. Pembuatan Film Dokumenter

Kegiatan Pembuatan Film Dokumenter mempunyai anggaran sebesar Rp. 89.001.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 86.983.000,00 dengan persentase 97,73%.

Output kegiatan: Tersedianya 2 paket Film Potensi daerah, dan 120 buah penggandaan/penyebaran film dokumenter.

5.4. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan

Untuk Kegiatan Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan mempunyai anggaran sebesar Rp. 118.366.800,00 realisasinya sebesar Rp. 114.048.750,00 dengan persentase 96,35 %.

Output kegiatan : cetak 90 buah buku Visualisasi Pembangunan, dan desain logo MTQ 2020.

5.5. Koordinasi Kehumasan

Kegiatan Koordinasi Kehumasan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 98.357.960,00 realisasinya sebesar Rp. 54.852.200,00 dengan

persentase 55,77%. telah dilaksanakan 1 kali Rakor kehumasan Pemerintah provinsi bersama kehumasan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan,

5.6. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah

Untuk Kegiatan Liputan Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Perubahan sebesar Rp. 652.278.783,00 realisasinya sebesar Rp. 652.278.783,00 dengan persentase 99,97%, output kegiatan : tersedianya pers release hasil liputan sesuai kegiatan Kepala /Wakil Kepala Daerah/Pimpinan Pemerintah Daerah.

5.7. Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi Persandian dan Hub. Masyarakat

Untuk Kegiatan Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi Persandian dan Hub. Masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 197.542.335,- realisasinya sebesar Rp. 196.433.300,00 dengan persentase 99,44%.output kegiatan: 1 kali Rapat Koordinasi dan buku rumusan analisa pemberitaan dan buku himpunan melalui e-Kliping.

5.8. Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Media Online

Untuk Kegiatan Pengkajian Analisis Pemberitaan mempunyai Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online Website sebesar Rp. 242.860.000,- realisasinya sebesar Rp. 223.410.000,00 dengan persentase sebesar 91,99%. Output kegiatan : Tersebar nya 7.500 berita /publikasi pemberitaan kepada masyarakat di 35 buah media Online lokal dan 1 berita/publikasi di 1 (satu) media online Nasional (R.Mol).

5.9. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak

Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media cetak dianggarkan sebesar Rp. 487.507.900,00 telah terealisasi sebesar Rp. 487.507.900,00 dengan persentase 98,53%.

Output Kegiatan :Publikasi 500 publikasi/ berita kepada masyarakat melalui 6 buah media cetak lokal, 11 buah media mingguan lokal dan 1 publikasi berita di media cetak Harian Nasional (Republika).

5.10. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik

Untuk Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik anggarannya sebesar Rp. 332.056.905,- realisasinya sebesar Rp. 300.111.000,00 atau persentase sebesar 90,38%. Output kegiatan : terlaksananya 3 kali dialog interaktif live di TVRI sumbar,10 kali siaran tunda, dan 6 kali live di TV local, 26 kali siaran Tunda 5 kali dialog interaktif di media radio (RRI.)

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Biro Humas Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	946.145.220	925.995.571	97,87
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000	95.051.900	95,05
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54.000.000,	49.968.000	92,53
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.650.400	5.251.000	92,93
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	111.960.800	107.331.600	95,87
VI	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<u>2.599.681.500</u>	<u>2.465.779.582</u>	94,85
	1. Penyebaran Informasi Melalui Media Luas/Ruang	203.518.120	187.843.450	92,30
	2. Peningkatan Sumberdaya Kehumasan	170.688.500	162.311.199	95,09
	3. Pembuatan Film Dokumenter	89.001.600	86.983.000	97,73
	4. Laoran Khusus Visualisasi Pembangunan	118.366.800	114.048.750	96,35
	5. Koordinasi Kehumasan	98.357.960	54.852.200	55,77
	6. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah	652.491.280	652.278.783	99,97
	7. Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi Persendian dan Hub. Masyarakat	197.542.335	196.433.300	99,44
	8. Penyebaran Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Online/Website	242.860.000	223.410.000	91,99
	9. Peneyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Cetak	494.798.000	487.507.900	98,53
	10. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik	332.056.905	300.111.000	90,38
	JUMLAH	3.763.437.920	3.599.409.653	95,64

B. Otutcome

Sasaran dan hasil Pelaksanaan dari Program dan Kegiatan Biro Humas dalam mendukung Urusan Pemerintahan Provinsi dapat diukur melalui indikator kinerja dari sasaran strategis Program dan Kegiatan yang ditargetkan untuk tahun 2019, adapun hasil/capaian yang diperoleh Tahun 2019 setelah pelaksanaan program diantaranya :

1) Meningkatnya Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator :

- Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi di Media Massa dengan target Tahun 2019 rangking 12 tingkat nasional, Realisasi tahun 2019 memperoleh peringkat 8 Nasional atau persentase capaian 66,7 %.

Dibanding tahun lalu, realisasi Peringkat Sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi dimedia massa rangking 18 meningkat 10 dibanding tahun 2018.

2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja :

Ratio Pemberitaan ditargetkan 40 : 40 : 20. (Positif 40%, Netral 40%, negative 20%). Realisasi ratio pemberitaan untuk tahun 2019 diperoleh 38:38:24 artinya pemberitaan yang bersifat positif tentang Pemerintah Daerah lebih tinggi dari berita negatif hal ini merupakan keberhasilan dalam penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah yang mengakibatkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Daerah.

C. Capaian Indikator Kinerja daerah

Sebagai tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan melalui Kinerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat dilihat dari realisasi hasil pengukuran indikator kinerja dari sasaran Strategis Biro Humas Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Namun Indikator Kinerja Biro Humas ini tidak terkait secara langsung dengan indikator Kinerja Provinsi yang telah ditetapkan dalam RPJM 2016-2021.

terdapat 3 (dua) indikator kinerja Biro Humas Adapun realisasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2019 dimaksud sebagaimana pada tabel di bawah ini :

**Table Realisasi Capaian IKU Biro Humas
Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi Sumatera Barat	Peringkat sebaran kegiatan Pemerintah Provinsi di Media Massa	Rangking 12 Nasional	Rangking 8 Nasional	66,67
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintah Daerah	Ratio pemberitaan	40 : 40 : 20	40 : 38 : 24	90
Meningkatnya Tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	100
PENCAPAIAN RATA-RATA				85,57

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Biro Humas yang merupakan bagian urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, maka Tahun 2019, Biro Humas tidak mengalami kendala yang berarti dalam pelaksanaan program maupun dalam merealisasikan keuangan. Namun kendala dan permasalahan, antara lain:

- 1) Jumlah SDM di bidang kehumasan perlu ditambah terutama tenaga peliput karena banyaknya ASN Humas yang telah pensiun dan akan memasuki masa pensiun,

Solusi :

Telah diajukan permintaan tenaga peliput kegiatan-kegiatan pimpinan daerah pemerintah provinsi sebanyak 3 (tiga) orang. Sehingga jumlah SDM tahun 2019 sebanyak 6 orang, mengingat hingga akhir 2019 dan dalam tahun 2020 berkurang sebanyak 4 orang akibat ASN tenaga peliput telah dan akan pensiun.

E. Penghargaan Nasional Yang Diterima

Penghargaan Nasional yang diterima Pemerintah Daerah Tahun 2019 antara lain

- 1) Anugerah Perintis Pers kepada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2019 :
“untuk penerapan kompetensi dan sertifikasi wartawan di Instansi Pemerintah”

F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2018

Terkait dengan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018, untuk Biro Humas tidak ada rekomendasi khusus dari DPRD terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Biro Humas tahun 2018.

Padang, 20 Januari 2020
KEPALA BIRO HUMAS

Drs.JASMAN,MM
NIP. 19680101 198809 1 001